

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap pemerintahan di dunia ini termasuk Indonesia selalu bertujuan mengembangkan perekonomian yang adil dan merata sehingga taraf hidup bangsa dapat meningkat. Upaya Indonesia dalam meningkatkan perekonomian yang adil dan merata yaitu dengan menerapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah atau merupakan pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Tujuan kebijakan desentralisasi adalah: a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, b) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, c) mendorong pembangunan daerah sesuai aspirasi masing-masing daerah.”¹

Daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya maka akan memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dalam suatu wilayah baik wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Dengan adanya PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga dapat

¹M. Suparmoko, **Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama, Andi Offset: 2002, hal. 33.

diketahui. Berikut ini disajikan data perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017.

Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (%) tahun 2014-2017

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.85	24.96	24.84	24.88
B. Pertambangan dan Penggalian	1.31	1.32	1.32	1.32
C. Industri pengolahan	19.8	19.58	19.55	19.03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.13	0.13	0.14
E. Pengadaan Air, Pengolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	0.09	0.10	0.10	0.10
F. Konstruksi	12.25	12.30	12.35	12.55
G. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.59	17.39	17.40	17.53
H. Transportasi dan Pergudangan	4.55	4.57	4.61	4.71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Mnum	2.2	2.24	2.27	2.31
J. Informasi dan Komunikasi	2.46	2.51	2.57	2.65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.1	3.17	3.13	2.99
L. Real Estate	4.08	4.11	4.14	4.23
M,N. Jasa Perusahaan	0.86	0.87	0.88	0.90
O. Administrasi Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.3	3.32	3.22	3.17
P. Jasa Pendidikan	2.02	0.92	2.01	2.01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.9	0.92	0.94	0.96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.49	0.49	0.50	0.51
PDRB	100	100	100	100
PDRB Tanpa Migas	99,85	99.86	99.86	99.86

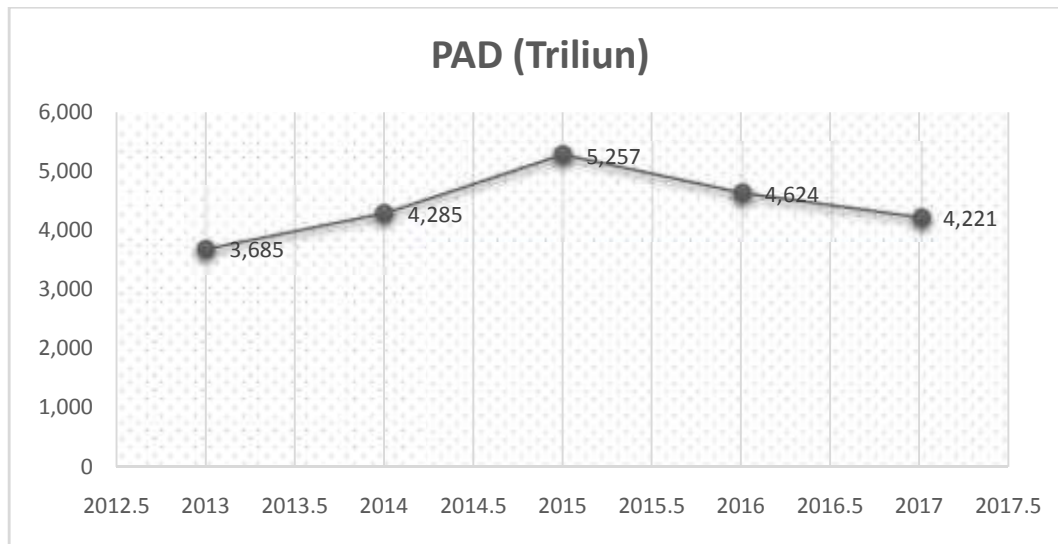
Sumber : BPS Sumatera Utara Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 24,88%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,03%, konstruksi sebesar 12,55%, perdagangan besar dan eceran dan separasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,53%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 5 persen. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa PDRB

berpengaruh positif penyerapan terhadap tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Febryana Rizqi Wasilaputri menyatakan bahwa PDRB memiliki “pengaruh positif dan signifikan dari variabel PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja Pulau Jawa. Koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,275939 juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% PDRB akan cenderung diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,27%, ceteris paribus.”²

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi wilayah juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor produksi salah satunya adalah akumulasi modal pada daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah salah satu modal utama daerah dalam melakukan kegiatan perekonomian, jika PAD meningkat maka danayang dimiliki daerah meningkat pula sehingga pemerintah daerah lebih berinisiatif dalam menggali potensi daerah. Semakin meningkatnya PAD akan memberikan pengaruh untuk pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah tersebut. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah memiliki sektor-sektor unggulan yang berbeda dalam memperoleh pendapatan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Berikut di bawah ini data PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017 :

²Febryana Rizqi Wasilaputri, **Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014**, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2016, hal.63, (Skripsi tidak diterbitkan).



Sumber : www.bps.com

Gambar 1.1 Grafik PAD Tahun 2012-2017

Berdasarkan data PAD Provinsi Sumatera Utara di atas dapat dilihat bahwa tahun 2013 nilai PAD sebesar 3,685 triliun rupiah dan tahun 2015 nilai PAD sebesar 5,257 triliun rupiah. Hal ini menandakan nilai PAD mengalami kenaikan sebesar 1,572 triliun rupiah dalam dua tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan sebesar 1,036 triliun rupiah dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak lepas dari pengaruh tenaga kerja (sumber daya manusia) yang memiliki potensi dalam mengolah semua sumber daya yang ada. Semakin banyak tenaga kerja yang berpotensi atau memiliki kualitas maka akan mempercepat pembangunan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Begitu juga PAD sangat berpengaruh terhadap investasi. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang dimiliki maka pemerintah akan berinisiatif untuk melakukan pembangunan sehingga adanya rasa percaya dari para investor-investor untuk menanamkan modal terhadap daerah tersebut. Begitu pun sebaliknya apabila terjadi penurunan terhadap PAD dapat dilihat dari potensi tenaga kerja dan investasi yang ada.

Selain PAD, investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi PDRB. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Sedangkan investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Investasi juga merupakan mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yang ingin dicapai yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Namun demikian, kedua jenis investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta pada akhirnya akan dapat menambah kesempatan kerja dan memberi sumbangan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Investasi yang semakin tinggi maka tingkat pengangguran menjadi rendah. Sebaliknya jika jumlah investasi rendah maka tingkat pengangguran akan meningkat. Dibawah ini merupakan tabel perkembangan investasi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2 Perkembangan Investasi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Investasi (Triliun Rupiah)
2013	12.931.890
2014	8.133.590
2015	17.874.140
2016	14.692.220

Sumber: <http://www.sumutprov.go.id> olahan data

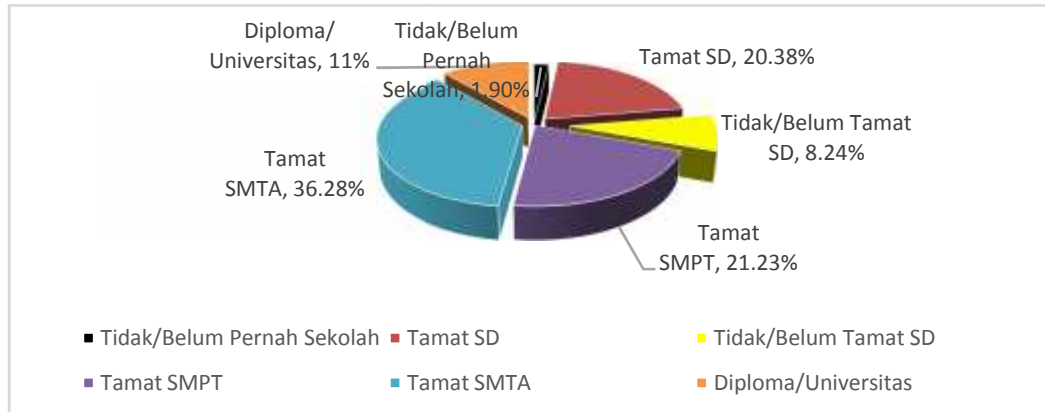
Pada tabel 1.2 di atas menunjukkan jumlah investasi (PMDN dan PMA) mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 jumlah investasi di Sumatera Utara sebesar Rp 12.931.890 yang mengalami penurunan yang cukup besar sebesar Rp 8.135.590. Pada tahun 2015 terjadi

kenaikan yang hebat sebesar Rp 17.874.140, hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah investasi suatu daerah akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja dan memperkecil tingkat pengangguran. Sehingga mendorong pertumbuhan dalam daerah tersebut.

Selain PAD dan investasi, sumber daya manusia atau yang lebih dikenal sebagai tenaga kerja juga merupakan faktor pendorong peningkatan PDRB. “Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya yang tergolong usia kerja adalah usia 15-64 tahun.”³Melalui jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang besar, produktif, dan efisien akan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Berdasarkan data jumlah tenaga kerja pada provinsi Sumatera Utara adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi.

Pada tahun 2013, TPAK di Sumatera Utara sebesar 70,67% kemudian turun menjadi 67,07% pada tahun 2014. Tahun 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 65,99%. Pada Tahun 2016, angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar berpendidikan SMTA. Persentase pada golongan ini mencapai 36,28%. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMTP masing-masing sekitar 31,11% dan 21,23%, sedangkan sisanya 11,38 % berpendidikan di atas SMTA.

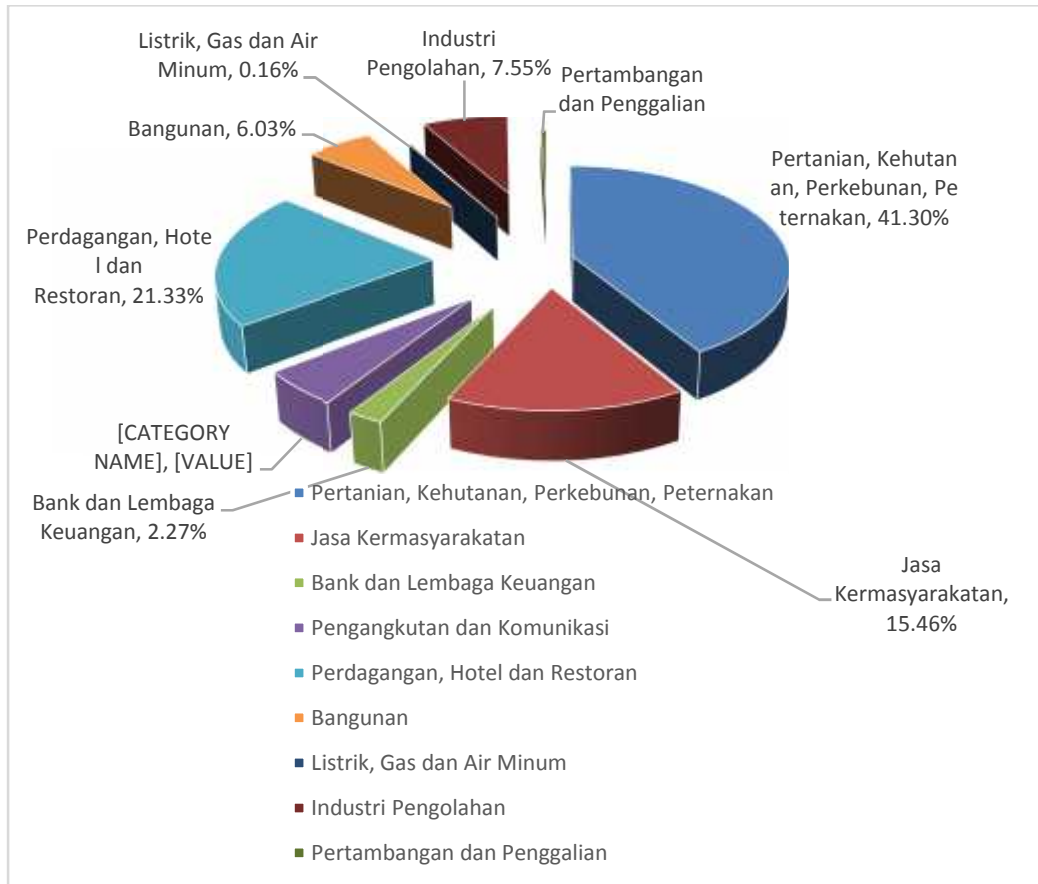
³Elvis F. Purba, dkk, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sadia: 2012.hal 57.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.2 Persentase Tenaga Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (36,27%) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 15,80%, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga mencapai 16,60%, sehingga hanya 3,75% penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap. Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2016 sebanyak 6,36 juta jiwa yang terdiri dari 5,99 juta jiwa terkategori bekerja dan 371,68 ribu jiwa terkategori pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 44,50%. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja adalah di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 19,23%. Sektor lain yang cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 15,12%, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,62%. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017- Survei Angkatan Kerja Nasional

Gambar 1.3 Persentase Tenaga Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama

Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (36,27%) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 15,80%, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga mencapai 16,60%, sehingga hanya 3,75% penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap. Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2016 sebanyak 6,36 juta jiwa yang terdiri dari 5,99 juta jiwa terkategori bekerja dan 371,68 ribu jiwa terkategori pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 44,50%. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja adalah di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar

19,23%. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 15,12%, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,62%. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas ada tiga hal yang perlu di kaji dalam penelitian ini dan di rumuskan sebagai masalah penelitian :

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah pengaruh Investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis besar pengaruh investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis besar pengaruh angkatan kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis dalam meneliti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengaruh PAD, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Sumatera Utara.

3. Sebagai bahan atau masukan untuk penelitian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan ekonomi suatu daerah pada hekekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dapat dilihat

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan dalam periode tertentu (satu tahun). Dengan demikian secara umum dinyatakan bahwa PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Putera “PDRB adalah nilai bersih baran dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode”.⁴

Menurut Tarigan “metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam 2 metode, yaitu “metode langsung dan metode tidak langsung”.⁵ Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada didaerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam:

- i.* Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/ sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku/ penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.
- ii.* Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan

⁴ Ridho Andykha Putera, **Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2018, hal. 9, (Skripsi tidak diterbitkan).

⁵ Robinson Tarigan, **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**, Jakarta:Bumi Aksara,2005, hal.23.

surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan yang dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan.

iii. Pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri.

Sedangkan metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat digunakan, yaitu: nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya.

2.1.1 Manfaat Perhitungan PDRB

1. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan.
2. Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
4. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah.
5. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.
6. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan datang.

2.1.2 PDRB Menurut Harga Konstan dan Harga Berlaku

Tingkat perekonomian suatu wilayah atau daerah dapat diukur dengan menggunakan besaran nilai PDRB yang merupakan jumlah dari nilai tambah seluruh sektor ekonomi. Melalui angka PDRB dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain disajikan dalam dua versi yaitu menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan seluruh nilai tambah yang dihasilkan, PDRB juga disajikan dengan versi yang lain yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

1. PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi dan deflasi, sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Perhitungan PDRB menurut harga berlaku dapat menghasilkan distribusi (share) masing-masing penggunaan atau pengeluaran masing-masing pelaku ekonomi dari waktu ke waktu.

2. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. PDRB atas dasar harga terbaru menggunakan harga pasar pada tahun tertentu (misalnya 1983, 1993 atau 2000) sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi atau deflasi. Penghitungan PDRB menurut harga konstan dapat menghasilkan laju pertumbuhan masing-masing penggunaan atau pengeluaran pelaku ekonomi dan PDRB dari waktu ke waktu.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

2.2.1 Jenis Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari :

- a) **Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.**
- b) **Dana Perimbangan.**
- c) **Pinjaman Daerah, dan**
- d) **Lain-lain pendapatan daerah yang sah.**⁶

Dalam Undang-undang tahun 2000 tentang pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Pajak menurut Ahmad Yani merupakan “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah.”⁷ Contoh hasil pajak daerah adalah: pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir daerah dan lainnya.

⁶M. Suparmoko, *Opcit* hal. 18.

⁷Mian Sirait, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Investasi Terhadap PDRB6 Kota di Sumatera Utara Periode Tahun 2000-2015*, Medan: Fakultas Ekonomi Pembangunan HKBP Nommensen, 2017, hal. 14 (Skripsi tidak diterbitkan).

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koperasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan ke kas daerah. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga yaitu; Jenis retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing- masing daerah yang bersangkutan. Contoh hasil retribusi daerah adalah jasa penggalan.

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangan fungsi ekonomi. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah: sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah, dan sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat diserahkan ke kas daerah. Contoh hasil laba perusahaan berasal dari BUMD yaitu PDAM.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain- lain PAD yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi : hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro barang dan/ jasa oleh daerah, pendapatan bunga,keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/ potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan.Contoh hasil dari lain-lain PAD adalah hasil tukar giro didaerah.

2.3 Investasi

Investasi diartikan “sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lam yang telah haus dan perlu didepresiasi untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal/penanaman modal) meliputi pengeluaran berikut:

- 1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.**
- 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.**
- 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.⁸**

⁸ Sadono Sukirno, **Makro Ekonomi Teori Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan 20, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 121.

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa: **“Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro dalam Dedi adalah:**

- 1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;**
- 2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;**
- 3. Kemajuan teknologi.”⁹**

Menurut Noor “secara konsep Investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atas keuntungan) dikemudian hari.”¹⁰ Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan penambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang.. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.

Menurut Mankiw berdasarkan pengeluaran investasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

⁹ Dedi Rustiono, **Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah**, Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP, 2008, hal. 41, (Tesis diterbitkan).

¹⁰ Henry Faizal Noor, **Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**, Cetakan Satu, Jakarta Barat, 2009, hal.4.

1. **Investasi tetap bisnis (business fixed investment), mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.**
2. **Investasi residensial (residential investment), mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.**
3. **Investasi persediaan (inventory investment), mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses dan barang jadi.¹¹**

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi memiliki peran penting sebagai pembentuk lapangan pekerjaan.

Dengan adanya investasi akan menambah persediaan barang modal, hal itu akan berpengaruh pada meningkatnya kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang semakin tinggi pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Investasi merupakan alat untuk mempercepat

¹¹N.Gregory Mankiw, **Makroekonomi**, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 476.

pertumbuhan tingkat produksi di Negara yang sedang berkembang, dengan demikian investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja.

2.3.1 Investasi Menurut Jenis

Menurut jenisnya, investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi langsung (*direct investment*), investasi tidak langsung (*indirect investment*) dengan uraian sebagai berikut:

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Adalah investasi pada asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya.

b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi tetapi pada asset keuangan (*financial asset*), seperti deposito, investasi pada surat berharga atau securitas, seperti saham dan obligasi, CP (*Commercial Paper*), reksadana, dan sebagainya.

2.3.2 Investasi Menurut Karakteristik

a. Investasi Publik (*Public investment*)

Adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini, bersifat nirlaba, atau non profit motif, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit, dan sarana serta prasarana publik lainnya. Investasi publik menghasilkan nilai tambah (*value added*) berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa, dan bunga, tanpa surplus usaha. Manfaat lain dari investasi ini adalah mendorong mobilitas perekonomian dan meningkatkan peradaban masyarakat suatu Negara.

b. Investasi Swasta (*Private investment*)

Adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, dengan tujuan mendapat manfaat berupa profit/laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan profit motif.

Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi, perusahaan, seperti:

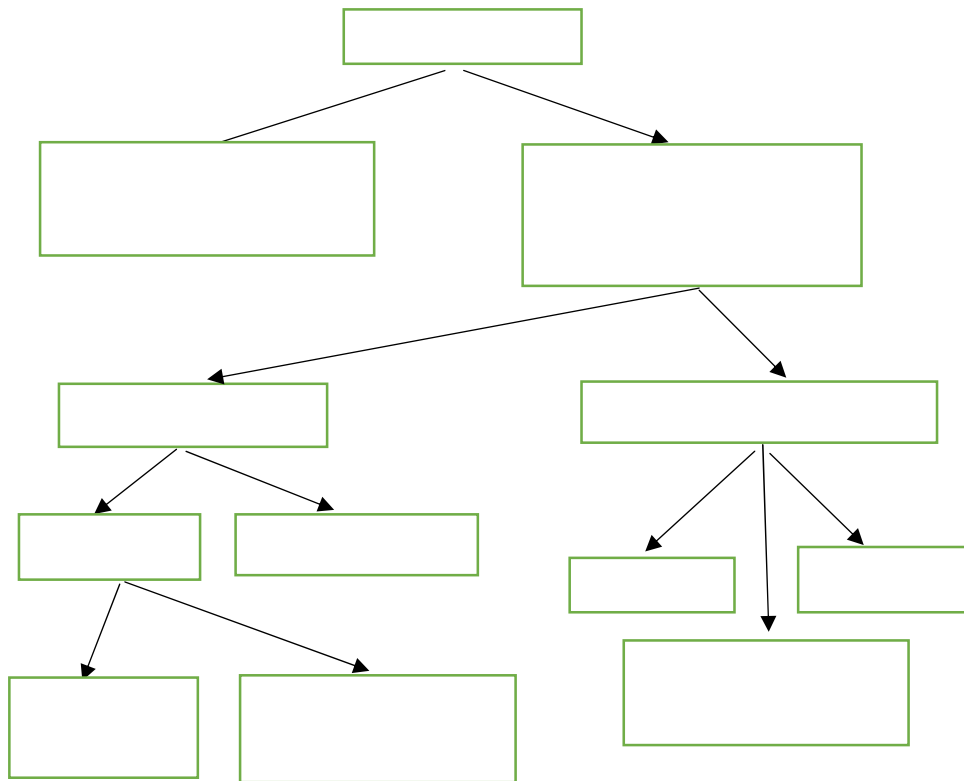
- 1. Usaha Mikro atau rumah tangga: biasanya belum punya badan hukum, serta skala usahanya relatif kecil, yang bergerak dibidang industri, dagang ataupun jasa.**
- 2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum, dengan skala usahanya mulai dari kecil, sampai menengah, baik dilihat dari omzet, modal usaha, maupun tenaga kerja, dengan bidang usaha industri, dagang ataupun jasa.**
- 3. Usaha besar, baik berbentuk PMDN maupun PMA, atau Investasi non Fasilitas, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹²**

2.4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumberdaya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumberdaya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Berikut hubungan antara penduduk, angkatan kerja dan pekerja.

¹² Henry Faizal Noor, **Op.Cit** hal.13.



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja, 2011 dalam buku Feriyanto, 2014

Gambar 2.1 Penduduk, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja

Penjelasan teknis variabel-variabel dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis RI selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
3. Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berada pada usia dibawah 15 tahun.
4. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

5. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun yang tidak mempunyai pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.
6. Bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus selama satu minggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha /kegiatan ekonomi).
7. Penganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu.
8. Sekolah adalah seseorang untuk bersekolah disekolah formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
9. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa menerima upah, misalnya ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga.
10. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain sekolah dan mengurus rumah tangga yakni mereka yang sudah pensiun, orang yang cacat jasmani dan yang tidak melakukan suatu pekerjaan dalam seminggu yang lalu.
11. Bekerja penuh adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputu) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan kerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
12. Pengangguran tidak kentara adalah pekerja yang dalam seminggunya bekerja dibawah 35 jam kerja.

2.4.1 Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:

1. Angkatan kerja

Yaitu mereka yang bekerja, tidak bekerja, dan mencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Peraturan Di Indonesia penduduk usia memasuki usia kerja adalah 15-64 tahun, tetapi tidak semua usia kerja masuk dalam angkatan kerja. Pelajar, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga adalah beberapa contoh golongan yang tidak masuk angkatan kerja. Penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja adalah golongan yang berperan aktif dalam menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi. Selain itu orang yang menganggur, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang sewaktu-waktu siap bekerja juga masuk dalam angkatan kerja.

2. Bukan angkatan kerja

Yaitu mereka yang bersekolah, golongan mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain. Golongan orang yang sekolah adalah mereka yang hanya bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang bertugas mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, sedangkan golongan lainnya adalah dua macam, yaitu golongan yang penerima pendapatan dan golongan orang yang tergantung oleh orang lain. Golongan penerima pendapatan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi menerima pendapatan baik tunjangan pensiun, bunga bank, dan sebagainya. Sedangkan golongan orang yang tergantung orang lain adalah orang yang sudah memasuki usia tua atau orang yang mengalami cacat. Golongan-golongan yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk berkerja. Oleh sebab ini golongan ini sering disebut dengan

Potensial Labour Force (PLC). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Berdasarkan publikasi International Labour Organization (ILO), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar sembilan tahun. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut Barthos angkatan kerja “adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penduduk Bukan dalam angkatan kerja terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga, murid atau mahasiswa, penerima pendapatan dan lain-lain.”¹³ Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja (pekerja) dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Dengan jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga kerja produktif. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Sementara menurut Purba “Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang berada pada usia kerja. Dalam literatur biasanya yang tergolong usia kerja adalah usia 15-64 tahun.”¹⁴ Melalui jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang besar, produktif, dan efisien akan

¹³Basir Barthos, **Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 17.

¹⁴Elvis F. Purba, dkk, **Op.Cit**, hal 57.

dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian Juwita Delimur Handayani, dkk dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Tingkat Investasi dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Lhokseumawe”. Penelitian menggunakan Analisis regresi berganda dengan persamaan : $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_i$. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:

1. Uji simultan

“Uji simultan secara serentak (secara bersama-sama) signifikan karena diperoleh secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD, Investasi dan Tenaga Kerjaterhadap PDRB.”¹⁵

2. Uji Parsial

¹⁵Juwita Delimur Handayani, dkk, **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2015** (Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, Volume 3, Nomer 3 November 2017), hal.46.

1. Secara parsial PAD tidak ada pengaruh terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe, karena tidak memenuhinya target PAD di Kota Lhokseumawe.
2. Secara parsial Investasi ada pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe.
3. Secara parsial Tenaga Kerja tidak ada pengaruh terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe, karena masih rendahnya tenaga kerja di Kota Lhokseumawe.”¹⁶

2. Penelitian Irawan, Toni Kussetiyono, 2013 dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Tenaga Kerja Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010”. Penelitian menggunakan Teknik analisis regresi data panel hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam perhitungan uji maka diperoleh :

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
3. Angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.¹⁷

3. Penelitian Mursalam Salim dengan judul Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder menggunakan analisa regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penanaman modal, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dengan nilai PDRB. Persamaan Regresi berganda (Multiple Regression) ditunjukkan sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$.

- a) Secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- b) Secara parsial Investasi PMA berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- c) Secara parsial Investasi PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB.”¹⁸

¹⁶Ibid, hal. 46.

¹⁷Toni Kussetiyono dan Irawan, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2013, hal. 68-69, (Skripsi tidak diterbitkan).

¹⁸Mursalam Salim, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2006-2010, Papua: Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua, hal. 8, (Skripsi tidak diterbitkan), 2013.

2.6 Hubungan PAD, Investasi, Tenaga Kerja terhadap PDRB

Untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi, maka Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah negara yang luas menerapkan sistem otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola daerah otonomnya sendiri dengan baik. Baik buruknya perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). Usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah tersebut yaitu dengan cara meningkatkan jumlah PAD, investasi serta memaksimalkan jumlah tenaga kerja.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. “Menurut Brata yang dikutip oleh Adi dan Harianto menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan.”¹⁹

”Kegiatan investasi adalah awal dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah berupa balas jasa produksi yang juga merupakan tujuan dari pengembangan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai sumber dari keajahteraan masyarakat.”²⁰Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan investasi. Diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan

¹⁹Ali Mashum, **Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan** Ekonomi, <http://ilmuiesp.blogspot.com>, Desember 2016 diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pada pukul 14.50 WIB.

²⁰Henry Faizal Noor, **Opcit**, hal. 30.

output yang dihasilkan, penghematan devisa atau penambahan devisa dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kegiatan investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi pun ikut terpacu pula.

Menurut Todarodalam Heidy :

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.²¹

Berdasarkan hubungan-hubungan yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD, Investasi dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh dalam meningkatkan PDRB suatu daerah.

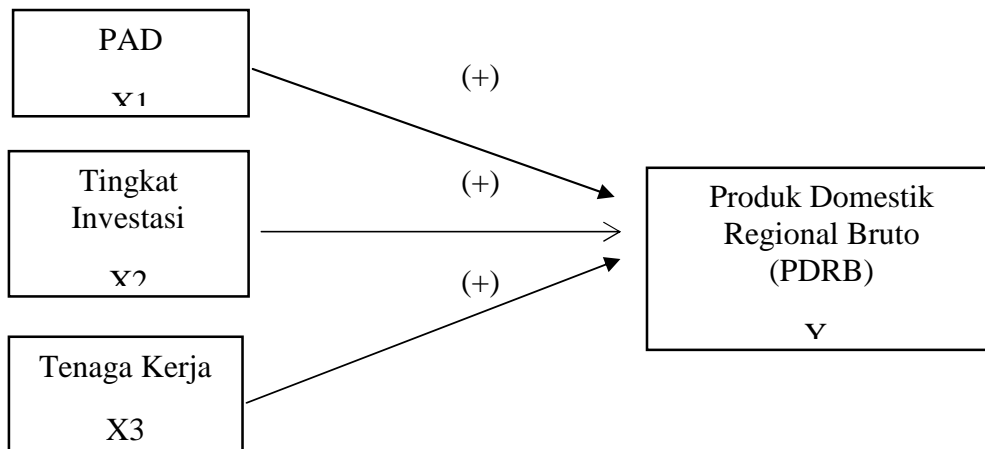
2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 sampai dengan 2017. Dari keempat variabel tersebut PAD, tingkat investasi dan tenaga kerja adalah variabel bebas dan variabel tak bebas adalah PDRB.

Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tolak ukur pemberdayaan daerah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan potensi daerahnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan ukuran potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pembangunan daerah agar terwujud pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Untuk melihat pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB maka digunakan analisis regresi berganda.

²¹Heidy Menajang, **Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado Tahun 2008-2012**, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi 2015, hal 10.

Bila investasi meningkat akan meningkatkan pendapatan daerah dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Demikian juga kemandirian keuangan daerah bila dikaitkan dengan investasi sangat berkaitan karena investasi dapat meningkatkan keuangan daerah dalam jangka panjang. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pendapatan yang berasal dari investasi daerah melalui Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Investasi ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomik bagi daerah seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Sama halnya dengan tenaga kerja yang merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas, dan pelaksana pembangunan di daerah sehingga dapat memajukan suatu daerah.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian karena kebenaran hipotesis masih perlu diuji melalui analisis data empiris.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi SumateraUtara tahun 2007-2017.
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.
3. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menganalisis pengaruh PAD, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017. Data yang dibutuhkan antara lain adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Data PAD digunakan adalah PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017 dalam satuan rupiah
2. Investasi adalah kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun modal asing ke dalam suatu negara/daerah. Data digunakan adalah jumlah investasi Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2007-2017 dalam satuan rupiah.
3. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu 15-64 tahun. Tenaga kerja juga merupakan sumber daya manusia yang utama yang dapat menghasilkan produktivitas. Data digunakan adalah data tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dalam satuan orang untuk tahun 2007-2017.
4. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode tertentu. Data PDRB digunakan adalah PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan dalam kurun waktu yang sama.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk menganalisis Pengaruh PAD, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara tahun (2007-2017) adalah model ekonometrik. Penggunaan ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural bertujuan memahami

ukuran kuantitatif, pengujian dan validasi hubungan variabel-variabel ekonomi. Model ekonometrik yang digunakan adalah model regresi linear berganda.

3.3.2 Penggunaan Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda (persamaan regresi sampel) adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \varepsilon_i; \quad i=1,2,3,\dots,n$$

Dimana :

Y = PDRB di Provinsi Sumatera Utara (dalam milyar rupiah)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ = Koefisien Regresi (Statistik)

X_1 = PAD di Provinsi Sumatera Utara (dalam milyar rupiah)

X_2 = Investasi di Provinsi Sumatera Utara (dalam milyar rupiah)

X_3 = Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara (dalam juta jiwa)

i = Galat (Error Term)

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Metode lain yang juga bisa digunakan untuk membuat kesimpulan sifat populasi dari data sampel adalah uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi, sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Dalam melakukan penelitian, kita harus membuat hipotesis penelitian yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika telah menggunakan uji-t dan uji-f.

3.3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (PAD, Investasi dan Tenaga kerja) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (PDRB), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata = 5%.

1. PAD (X1)

H_0 : $\beta_1 = 0$, artinya PAD tidak berpengaruh signifikan

H_1 : $\beta_1 > 0$, artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_n = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$: koefisien regresi (statistik)

β_1 : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

2. Investasi (X2)

H_0 : $\beta_2 = 0$ artinya, Investasi provinsi tidak berpengaruh signifikan.

H_1 : $\beta_2 > 0$ artinya, Investasi provinsi berpengaruh positif dan signifikan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_n = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S \hat{\beta}_2}$$

$\hat{\beta}_2$: koefisien regresi (statistik)

β_2 : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB

3. Tenaga Kerja (X3)

$H_0: \beta_3 = 0$ artinya, Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan.

$H_1: \beta_3 > 0$ artinya, Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_n = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$: koefisien regresi (statistik)

β_3 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

3.3.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel independen (variabel-variabel bebas) yang diambil mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat) secara bersama-sama atau tidak Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_1 : $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq 0$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan dan f untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.4 Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji keباikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel-variabel tak bebas dengan

variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai, model yang digunakan koefisien determinasi R^2 . Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$), nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel tak bebas dalam menjelaskan variasi variabel bebas amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel tak bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tak bebas.

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

3.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.4.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.

d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah “dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor), bila nilai $VIF < 10$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya $VIF > 10$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel independen tidak berarti dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3.4.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu.

”Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu dapat dilakukan dengan uji Breush - Godfrey atau (BG) atau (LM) test. Jika $(n-p)R^2$ yang merupakan chi square X^2 hitung lebih besar dari nilai kritis chi square X^2 pada derajat kepercayaan tertentu α , artinya model tidak mengalami autokorelasi.”²² Langkah-langkahnya yaitu:

1. Estimasi persamaan regresi dengan metode OLS dan mendapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi residual et dengan variabel bebas Xt.
3. Jika sampel besar, maka model persamaan akan mengikuti distribusi chi-squares dengan df sebanyak p, nilai hitung chi-squares dapat dihitung dengan:

$$(n-p)R^2 = X^2 p$$

Dimana:

n = jumlah observasi

p = Obs * R^2

R^2 = Koefisien Determinasi

X^2 = Chi-squares

3.4.3 Normalitas

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai variabel pengganggu dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian normalitas menggunakan pendekatan Jorque-Berra test. Sebagai patokan dari Jorque-Berra test adalah sebagai berikut:

²² Celeste.C.H.E.Rarun, dkk, **Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume18, No. 01, Tahun 2018) hal.96.

1. Apabila nilai probabilitas J-B hitung $<$ nilai probabilitas α (0,05), maka hipotesis menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Apabila nilai probabilitas J-B hitung $>$ nilai probabilitas α (0,05), maka hipotesis menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima.

3.5 Definisi Variabel Operasional

1. Produk Domestik Regional Bruto (Y)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit lapangan usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu. PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Investasi (X2)

Investasi merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun asing untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna mendapatkan keuntungan pada masa depan. Pada penelitian data yang digunakan adalah data investasi Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Tenaga Kerja (X3)

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja yaitu 15-64 tahun. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dengan satuan orang.